



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang paling penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk bersubsidi Perkecamatan Tahun 2013.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembara Negara No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 /Pementan/SR. 130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2013;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN TAHUN 2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : ———

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Sistem Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian.

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengencer resmi atau kelompok tani.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan/Undang.
8. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura.
9. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
10. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
11. Pengecer resmi, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak).
12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
13. Rencana Defenitif Kebutuhan–Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau undang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
14. Lini IV adalah lokasi gudang pengencer di wilayah Kecamatan dan /atau Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II PERUNTUKAN

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Peruntukan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk perusahaan tanaman pangan, hortikultura, pekerbunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi harus dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi, standar teknis dan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan perkecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Jika terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada suatu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka dilakukan realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP36, NPK dan pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Pusri Sriwijaya atau PT Petrokimia Gresik.

Bagian Kedua Harga Eceran Tertinggi

Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (2) HET Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pmbudidaya ikan atau udang dikios pengencer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi " *Pupuk Bersubsidi Pemerintah* " " *Barang Dalam Kemasan* " yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus.

Bagian Ketiga Distributor dan Pengecer Resmi

Pasal 7

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh distributor dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang di daerah.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD.
- (2) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.

Pasal 10

- (1) Distributor pupuk dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor pupuk dan pengecer resmi harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu kedepannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET.

Pasal 11

- 1) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi distributor pupuk non subsidi serta memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya.
- 2) Pengecer resmi dilarang memperjualan belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 12

Pengecer resmi harus memasang papan nama dilengkapi dengan papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gedung lini III Distributor kepada pengecer di wilayah tanggungjawabnya.
- b. Dalam pelaksanaan pengangkutan, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- c. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/kelompok tani.
- d. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani /petani dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan oleh masing-masing kelompok tani / petani pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.
- e. Jika alokasi jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk sebagaimana tercantum dalam RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh pengecer resmi dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan HET serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Distributor berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (3) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 15

Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, pengecer resmi menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dengan pengecer resmi kepada KPPP atau SKPD dan disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis SKPD.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 16

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada produsen dan KPPP dengan tembusan kepada SKPD.
- (2) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada SKPD.

Pasal 17

- (1) KPPP menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Gubernur.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 18

- (1) Distributor wajib memberikan teguran kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2).
- (2) Apabila Pengecer tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, distributor wajib memberi skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran tertulis dan/atau mengusulkan kepada distributor untuk dicabut sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Pasal 20

- (1) Apabila distributor dan pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan / penyelewengan penyalur pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam 13, maka Pemerintah daerah dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal Pencabutan rekomendasi terhadap pengecer resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), distributor berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai pengecer resmi.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 21

- (1) Apabila distributor tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP.
- (4) KPPP dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada distributor yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

SYAFRI BASYIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 33 TAHUN 2012
 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK
 BERSUBSIDI PERKECAMATAN TAHUN 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN TAHUN 2013

I. PUPUK UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN

A. UREA

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	1.27	1.19	1.45	1.10	0.97	1.58	1.58	1.62	0.98	1.62	1.61	1.18	16.14
3	Padang Selatan	0.13	0.12	0.15	0.11	0.10	0.16	0.16	0.17	0.10	0.17	0.17	0.12	1.68
4	Padang Utara	0.13	0.12	0.15	0.11	0.10	0.16	0.16	0.17	0.10	0.17	0.17	0.12	1.68
5	Koto Tengah	26.05	24.44	29.81	22.56	19.87	32.49	32.49	33.30	19.60	33.30	33.03	24.17	331.11
6	Nanggalo	3.35	3.14	3.83	2.90	2.55	4.17	4.17	4.28	2.52	4.28	4.24	3.10	42.53
7	Kuranji	27.06	25.38	30.96	23.43	20.64	33.75	33.75	34.59	20.36	34.59	34.31	25.11	343.94
8	Pauh	14.55	13.65	16.65	12.60	11.10	18.15	18.15	18.60	10.95	18.60	18.45	13.50	184.92
9	Lb. Kilangan	7.68	7.21	8.79	6.65	5.86	9.58	9.58	9.82	5.78	9.82	9.74	7.13	97.67
10	Lb. Begalung	6.41	6.02	7.34	5.55	4.89	8.00	8.00	8.20	4.83	8.20	8.13	5.95	81.53
11	Bungus Teluk Kabung	10.37	9.73	11.86	8.98	7.91	12.93	12.93	13.25	7.80	13.25	13.15	9.62	131.79
	Jumlah	97.00	91.00	111.00	84.00	74.00	121.00	121.00	124.00	73.00	124.00	123.00	90.00	1,233.00

B. SP-36

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.87	0.79	0.98	0.74	0.65	1.09	1.06	1.08	0.64	1.09	1.09	0.79	10.88
3	Padang Selatan	0.09	0.08	0.10	0.08	0.07	0.11	0.11	0.11	0.07	0.11	0.11	0.08	1.13
4	Padang Utara	0.09	0.08	0.10	0.08	0.07	0.11	0.11	0.11	0.07	0.11	0.11	0.08	1.13
5	Koto Tengah	12.62	11.59	14.28	10.76	9.52	15.93	15.52	15.73	9.31	15.93	15.93	11.59	158.73
6	Nanggalo	2.28	2.09	2.58	1.94	1.72	2.88	2.80	2.84	1.68	2.88	2.88	2.09	28.68
7	Kuranji	18.45	16.94	20.87	15.73	13.91	23.29	22.68	22.99	13.61	23.29	23.29	16.94	231.97
8	Pauh	9.92	9.11	11.22	8.46	7.48	12.52	12.20	12.36	7.32	12.52	12.52	9.11	124.72
9	Lb. Kilangan	5.24	4.81	5.93	4.47	3.95	6.61	6.44	6.53	3.86	6.61	6.61	4.81	65.87
10	Lb. Begalung	4.37	4.01	4.95	3.73	3.30	5.52	5.38	5.45	3.23	5.52	5.52	4.01	54.99
11	Bungus Teluk Kabung	7.07	6.49	8.00	6.03	5.33	8.92	8.69	8.81	5.22	8.92	8.92	6.49	88.89
	Jumlah	61.00	56.00	69.00	52.00	46.00	77.00	75.00	76.00	45.00	77.00	77.00	56.00	767.00

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	1.12	1.04	1.28	0.96	0.84	1.41	1.39	1.42	0.84	1.42	1.42	1.02	14.15
3	Padang Selatan	0.12	0.11	0.13	0.10	0.09	0.15	0.14	0.15	0.09	0.15	0.15	0.11	1.47
4	Padang Utara	0.12	0.11	0.13	0.10	0.09	0.15	0.14	0.15	0.09	0.15	0.15	0.11	1.47
5	Koto Tengah	16.35	15.11	18.63	14.07	12.21	20.44	20.28	20.69	12.21	20.69	20.69	14.87	206.25
6	Nanggalo	2.95	2.73	3.37	2.54	2.21	3.70	3.67	3.74	2.21	3.74	3.74	2.69	37.29
7	Kuranji	23.89	22.08	27.22	20.57	17.84	29.96	29.64	30.24	17.84	30.24	30.24	21.79	301.56
8	Pauh	12.85	11.87	14.63	11.06	9.59	16.11	15.93	16.26	9.59	16.26	16.26	11.71	162.13
9	Lb. Kilangan	6.78	6.27	7.73	5.84	5.07	8.51	8.42	8.59	5.07	8.59	8.59	6.19	85.63
10	Lb. Begalung	5.66	5.23	6.45	4.88	4.23	7.10	7.03	7.17	4.23	7.17	7.17	5.16	71.48
11	Bungus Teluk Kabung	9.16	8.48	10.43	7.88	6.84	11.48	11.36	11.59	6.84	11.59	11.59	8.35	115.55
	Jumlah	79.00	73.00	90.00	68.00	59.00	99.00	98.00	100.00	59.00	100.00	100.00	72.00	997.00

D. ZA

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.33	0.31	0.37	0.28	0.24	0.41	0.40	0.41	0.24	0.41	0.41	0.30	4.12
3	Padang Selatan	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.43
4	Padang Utara	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.43
5	Koto Tengah	4.76	4.55	5.38	4.14	3.52	6.00	5.79	6.00	3.52	6.00	6.00	4.35	60.01
6	Nanggalo	0.86	0.82	0.97	0.75	0.64	1.08	1.05	1.08	0.64	1.08	1.08	0.79	10.85
7	Kuranji	6.96	6.65	7.86	6.05	5.14	8.77	8.47	8.77	5.14	8.77	8.77	6.35	87.71
8	Pauh	3.74	3.58	4.23	3.25	2.76	4.72	4.55	4.72	2.76	4.72	4.72	3.41	47.15
9	Lb. Kilangan	1.98	1.89	2.23	1.72	1.46	2.49	2.40	2.49	1.46	2.49	2.49	1.80	24.91
10	Lb. Begalung	1.65	1.58	1.86	1.43	1.22	2.08	2.01	2.08	1.22	2.08	2.08	1.51	20.79
11	Bungus Teluk Kabung	2.67	2.55	3.01	2.32	1.97	3.36	3.24	3.36	1.97	3.36	3.36	2.43	33.61
	Jumlah	23.00	22.00	26.00	20.00	17.00	29.00	28.00	29.00	17.00	29.00	29.00	21.00	290.00

E. PUPUK ORGANIK*(dalam ton)*

PDF Eraser Free

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.40	0.37	0.45	0.34	0.30	0.50	0.50	0.50	0.30	0.50	0.50	0.37	5.01
3	Padang Selatan	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.52
4	Padang Utara	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.52
5	Koto Tengah	5.79	5.38	6.62	4.97	4.35	7.24	7.24	7.24	4.35	7.24	7.24	5.38	73.05
6	Nanggalo	1.05	0.97	1.20	0.90	0.79	1.31	1.31	1.31	0.79	1.31	1.31	0.97	13.20
7	Kuranji	8.47	7.86	9.68	7.28	6.35	10.59	10.59	10.59	6.35	10.59	10.59	7.86	106.76
8	Pauh	4.55	4.23	5.20	3.90	3.41	5.69	5.69	5.69	3.41	5.69	5.69	4.23	57.40
9	Lb. Kilangan	2.40	2.23	2.75	2.06	1.80	3.01	3.01	3.01	1.80	3.01	3.01	2.23	30.32
10	Lb. Begalung	2.01	1.86	2.29	1.72	1.51	2.51	2.51	2.51	1.51	2.51	2.51	1.86	25.31
11	Bungus Teluk Kabung	3.24	3.01	3.71	2.78	2.43	4.06	4.06	4.06	2.43	4.06	4.06	3.01	40.91
	Jumlah	28.00	26.00	32.00	24.00	21.00	35.00	35.00	35.00	21.00	35.00	35.00	26.00	353.00

II. PUPUK UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA**A. UREA***(dalam ton)*

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.44	0.36	0.28	0.17	0.17	0.08	-	0.28	0.17	0.17	0.18	0.08	2.37
3	Padang Selatan	0.35	0.30	0.22	0.13	0.13	0.06	-	0.25	0.11	0.11	0.14	0.06	1.86
4	Padang Utara	0.45	0.37	0.27	0.18	0.18	0.09	-	0.28	0.17	0.17	0.18	0.09	2.43
5	Koto Tengah	0.63	0.50	0.38	0.27	0.27	0.14	-	0.34	0.28	0.28	0.26	0.14	3.49
6	Nanggalo	0.56	0.45	0.34	0.23	0.23	0.12	-	0.32	0.24	0.24	0.23	0.12	3.08
7	Kuranji	0.53	0.42	0.32	0.21	0.21	0.11	-	0.31	0.22	0.22	0.21	0.11	2.88
8	Pauh	0.59	0.47	0.36	0.25	0.25	0.13	-	0.33	0.26	0.26	0.24	0.13	3.25
9	Lb. Kilangan	0.54	0.42	0.32	0.22	0.22	0.11	-	0.31	0.22	0.22	0.21	0.11	2.89
10	Lb. Begalung	0.52	0.41	0.31	0.21	0.21	0.10	-	0.31	0.21	0.21	0.21	0.10	2.80
11	Bungus Teluk Kabung	0.38	0.31	0.22	0.14	0.14	0.06	-	0.26	0.13	0.13	0.15	0.07	1.99
	Jumlah	5.00	4.00	3.00	2.00	2.00	1.00	-	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	27.00

B. SP-36

PDF Eraser Free

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.04	0.22
3	Padang Selatan	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.04	0.22
4	Padang Utara	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.04	0.22
5	Koto Tengah	0.12	0.26	0.25	0.12	0.12	0.12	0.12	0.24	0.12	0.24	0.12	0.12	1.95
6	Nanggalo	0.12	0.25	0.25	0.12	0.12	0.12	0.12	0.24	0.12	0.24	0.12	0.12	1.95
7	Kuranji	0.23	0.39	0.42	0.22	0.22	0.21	0.24	0.51	0.26	0.51	0.24	0.18	3.65
8	Pauh	0.12	0.26	0.25	0.12	0.12	0.12	0.12	0.24	0.12	0.24	0.12	0.12	1.95
9	Lb. Kilangan	0.12	0.26	0.25	0.12	0.12	0.12	0.12	0.24	0.12	0.24	0.12	0.12	1.95
10	Lb. Begalung	0.12	0.26	0.25	0.12	0.12	0.12	0.12	0.24	0.12	0.24	0.12	0.12	1.95
11	Bungus Teluk Kabung	0.12	0.26	0.25	0.12	0.12	0.12	0.12	0.24	0.12	0.24	0.12	0.12	1.95
	Jumlah	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00

C. ZA

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	-	-	-	-	0.04	0.03	0.02	0.24
3	Padang Selatan	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	-	-	-	-	0.04	0.03	0.02	0.24
4	Padang Utara	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	-	-	-	-	0.04	0.03	0.02	0.24
5	Koto Tengah	0.23	0.44	0.22	0.20	0.20	-	-	-	-	0.19	0.21	0.22	1.90
6	Nanggalo	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	-	-	-	-	0.04	0.03	0.02	0.24
7	Kuranji	0.24	0.46	0.22	0.20	0.21	-	-	-	-	0.20	0.21	0.22	1.95
8	Pauh	0.19	0.37	0.18	0.17	0.17	-	-	-	-	0.17	0.17	0.18	1.60
9	Lb. Kilangan	0.11	0.21	0.11	0.10	0.10	-	-	-	-	0.10	0.10	0.11	0.95
10	Lb. Begalung	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	-	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.89
11	Bungus Teluk Kabung	0.08	0.16	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	0.09	0.08	0.08	0.74
	Jumlah	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	9.00

III. PUPUK UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN

PDF Eraser Free

A. UREA

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.27
2	Padang Timur	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.08	0.10	0.83
3	Padang Selatan	0.45	0.30	0.37	0.45	0.45	0.30	0.30	0.22	0.30	0.30	0.45	0.52	4.38
4	Padang Utara	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.61
5	Koto Tengah	1.25	0.83	1.04	1.25	1.25	0.83	0.83	0.62	0.83	0.83	1.25	1.45	12.25
6	Nanggalo	0.08	0.05	0.07	0.08	0.08	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.08	0.09	0.79
7	Kuranji	0.59	0.39	0.49	0.59	0.59	0.39	0.39	0.30	0.39	0.39	0.59	0.69	5.81
8	Pauh	0.61	0.40	0.50	0.61	0.61	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.61	0.71	5.95
9	Lb. Kilangan	1.03	0.69	0.86	1.03	1.03	0.69	0.69	0.52	0.69	0.69	1.03	1.20	10.15
10	Lb. Begalung	0.66	0.44	0.55	0.66	0.66	0.44	0.44	0.33	0.44	0.44	0.66	0.78	6.54
11	Bungus Teluk Kabung	1.16	0.77	0.97	1.16	1.16	0.77	0.77	0.58	0.77	0.77	1.16	1.35	11.41
	Jumlah	6.00	4.00	5.00	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	6.00	7.00	59.00

B. SP- 36

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.14
2	Padang Timur	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.42
3	Padang Selatan	0.22	0.22	0.22	0.22	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.22	0.22	2.23
4	Padang Utara	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.31
5	Koto Tengah	0.62	0.62	0.62	0.62	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.62	0.62	6.23
6	Nanggalo	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.40
7	Kuranji	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	2.96
8	Pauh	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	3.03
9	Lb. Kilangan	0.52	0.52	0.52	0.52	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.52	0.52	5.16
10	Lb. Begalung	0.33	0.33	0.33	0.33	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.33	0.33	3.32
11	Bungus Teluk Kabung	0.58	0.58	0.58	0.58	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.58	0.58	5.80
	Jumlah	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	30.00

E. PUPUK ORGANIK

PDF Eraser Free

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12
2	Padang Timur	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.29
3	Padang Selatan	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.07	0.07	0.07	0.07	0.15	0.15	1.48
4	Padang Utara	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.24
5	Koto Tengah	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.20	0.20	0.20	0.20	0.42	0.42	4.13
6	Nanggalo	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.30
7	Kuranji	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	1.96
8	Pauh	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	2.01
9	Lb. Kilangan	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.17	0.17	0.17	0.17	0.34	0.34	3.42
10	Lb. Begalung	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11	0.11	0.22	0.22	2.21
11	Bungus Teluk Kabung	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.19	0.19	0.19	0.19	0.39	0.39	3.85
	Jumlah	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	20.00

IV. PUPUK UNTUK KOMODITI PERIKANAN BUDIDAYA**A. UREA***(dalam ton)*

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	0.93	0.92	0.93	1.05	0.99	0.92	0.92	0.92	0.72	0.92	0.92	0.92	11.05
4	Padang Utara	0.93	0.92	0.93	1.05	0.99	0.92	0.92	0.92	0.72	0.92	0.92	0.92	11.06
5	Koto Tengah	1.30	1.29	1.30	1.47	1.38	1.29	1.29	1.29	1.01	1.29	1.29	1.29	15.47
6	Nanggalo	0.58	0.55	0.56	0.63	0.59	0.55	0.55	0.55	0.43	0.55	0.55	0.55	6.63
7	Kuranji	0.74	0.73	0.74	0.84	0.79	0.73	0.73	0.73	0.58	0.73	0.73	0.73	8.84
8	Pauh	0.93	0.92	0.93	1.05	0.99	0.92	0.92	0.92	0.72	0.92	0.92	0.92	11.05
9	Lb. Kilangan	0.93	0.92	0.93	1.05	0.99	0.92	0.92	0.92	0.72	0.92	0.92	0.92	11.05
10	Lb. Begalung	0.74	0.73	0.74	0.84	0.79	0.73	0.73	0.73	0.58	0.73	0.73	0.73	8.84
11	Bungus Teluk Kabung	0.93	0.92	0.93	1.05	0.99	0.92	0.92	0.92	0.72	0.92	0.92	0.92	11.05
	Jumlah	8.00	7.90	8.00	9.00	8.50	7.90	7.90	7.90	6.20	7.90	7.90	7.90	95.00

B. SP-36

PDF Eraser Free

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	0.13	0.26	0.23	0.31	0.31	0.33	0.27	0.31	0.31	0.26	0.22	0.25	8.74
4	Padang Utara	0.13	0.26	0.00	0.31	0.31	0.00	0.27	0.31	0.00	0.26	0.22	0.00	5.63
5	Koto Tengah	0.70	0.51	0.43	0.45	0.46	0.48	0.65	0.47	0.60	0.50	0.33	0.49	15.83
6	Nanggalo	0.13	0.26	0.23	0.31	0.31	0.33	0.27	0.31	0.37	0.26	0.22	0.25	8.89
7	Kuranji	0.70	0.51	0.42	0.45	0.46	0.48	0.52	0.62	0.46	0.42	0.44	0.37	15.12
8	Pauh	0.70	0.51	0.42	0.45	0.46	0.48	0.39	0.47	0.46	0.34	0.33	0.37	13.75
9	Lb. Kilangan	0.70	0.51	0.42	0.45	0.46	0.48	0.39	0.47	0.60	0.34	0.33	0.49	14.42
10	Lb. Begalung	0.70	0.51	0.61	0.45	0.46	0.63	0.52	0.62	0.60	0.42	0.44	0.49	16.78
11	Bungus Teluk Kabung	0.13	0.26	0.23	0.31	0.31	0.33	0.52	0.62	0.60	0.42	0.44	0.49	12.85
	Jumlah	4.00	3.60	3.00	3.50	3.50	3.50	3.80	4.20	4.00	3.20	3.00	3.20	42.50

C. NPK*(dalam ton)*

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	0.03	0.07	0.08	0.09	0.13	0.14	0.09	0.10	0.09	0.12	0.10	0.03	8.74
4	Padang Utara	0.03	0.07	0.00	0.09	0.13	0.00	0.09	0.10	0.00	0.12	0.10	0.00	5.63
5	Koto Tengah	0.17	0.14	0.14	0.13	0.20	0.20	0.22	0.14	0.18	0.23	0.14	0.05	15.83
6	Nanggalo	0.03	0.07	0.08	0.09	0.13	0.14	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.03	8.89
7	Kuranji	0.17	0.14	0.14	0.13	0.20	0.20	0.18	0.19	0.14	0.20	0.19	0.04	15.12
8	Pauh	0.17	0.14	0.14	0.13	0.20	0.20	0.13	0.14	0.14	0.16	0.14	0.04	13.75
9	Lb. Kilangan	0.17	0.14	0.14	0.13	0.20	0.20	0.13	0.14	0.18	0.16	0.14	0.05	14.42
10	Lb. Begalung	0.17	0.14	0.20	0.13	0.20	0.27	0.18	0.19	0.18	0.20	0.19	0.05	16.78
11	Bungus Teluk Kabung	0.03	0.07	0.08	0.09	0.13	0.14	0.18	0.18	0.18	0.20	0.19	0.05	12.85
	Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.30	1.30	1.20	1.50	1.30	0.35	13.95

D. ZA

PDF Eraser Free

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	0.03	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	8.74
4	Padang Utara	0.03	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	5.63
5	Koto Tengah	0.17	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	15.83
6	Nanggalo	0.03	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	8.89
7	Kuranji	0.17	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	15.12
8	Pauh	0.17	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	13.75
9	Lb. Kilangan	0.17	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	14.42
10	Lb. Begalung	0.17	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	16.78
11	Bungus Teluk Kabung	0.03	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	12.85
	Jumlah	1.00						0.83						1.83

E. PUPUK ORGANIK

(dalam ton)

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	8.74
4	Padang Utara	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	5.63
5	Koto Tengah	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	15.83
6	Nanggalo	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	8.89
7	Kuranji	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	15.12
8	Pauh	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	13.75
9	Lb. Kilangan	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	14.42
10	Lb. Begalung	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	16.78
11	Bungus Teluk Kabung	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	12.85
	Jumlah	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	0.85	10.05

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR